

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Industri kecil dan rumah tangga banyak tumbuh berkembang di Indonesia. Hal ini disebabkan industri kecil dan rumah tangga pada umumnya memiliki jumlah karyawan yang sedikit, modal terbatas, dan volume penjualan yang rendah. Akan tetapi secara keseluruhan merupakan sector yang mampu menyerap tenaga lokal yang cukup besar dan tersebar (Suryana, 2001:84)

Kabupaten Lumajang merupakan salah satu daerah yang berada di wilayah bagian selatan Propinsi Jawa Timur. Kabupaten Lumajang memiliki 21 Kecamatan dengan batas-batas wilayah yaitu sebelah utara Kabupaten Probolinggo, sebelah timur Kabupaten Jember, sebelah selatan Samudera Indonesia, dan sebelah barat Kabupaten Malang.

Sebagaimana pada umumnya Kabupaten yang terletak di daerah selatan, maka Kabupaten Lumajang memiliki potensi yang cukup besar dalam sektor pertanian dan pertambangan meskipun belum sepenuhnya dapat dieksploitasi secara optimal. Meskipun peningkatan paling besar berikutnya adalah pada sektor sekunder dan tersier, namun hal itu menunjukkan bahwa sektor tersebut mengalami imbas kenaikan karena disebabkan sektor primer yang semakin berkembang.

Pada era otonomi ini daerah diberi keleluasaan yang lebih besar dalam melakukan eksploitasi terhadap potensi ekonomi daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat, namun demikian juga ada penekanan untuk tetap memperhatikan pengelolaan potensi secara bijaksana dengan

memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan kelestarian lingkungan. Untuk itu berbagai program kebijakan yang telah disusun dan dilaksanakan pemerintah Kabupaten Lumajang juga berpijak pada prinsip tersebut.

Untuk melihat perkembangan kondisi ekonomi di Kabupaten Lumajang diperlukan adanya data yang bersifat dinamis, *up to date*, kontinyu dan *accessable*. Dengan adanya data tersebut Pemerintah Kabupaten Lumajang dapat menjadikannya bahan informasi dalam penyusunan kebijakan ekonomi khususnya dalam memacu pertumbuhan sektor potensial, sektor potensial yang dapat menarik pertumbuhan ekonomi sektor yang lain, serta sektor potensial yang pertumbuhannya melemah dan dapat berdampak pada menurunnya pertumbuhan ekonomi sektor yang lain. Dengan demikian maka pelaksanaan program/kegiatan bidang perekonomian dapat lebih fokus dan tepat sasaran.

Setiap daerah memiliki potensi ekonomi yang merupakan sumberdaya alam (*natural resources/endowment factors*) maupun potensi sumberdaya manusia yang dapat memberikan manfaat (*benefit*) serta dapat digunakan sebagai modal dasar pembangunan (ekonomi) wilayah.

Dalam era otonomi daerah dewasa ini, kecepatan dan optimalisasi pembangunan wilayah (daerah) tentu akan sangat ditentukan oleh kapasitas dan kapabilitas sumberdaya ekonomi (baik sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia). Keterbatasan dalam kepemilikan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang berkualitas dapat menimbulkan kemunduran yang sangat berarti dalam dinamika pembangunan ekonomi daerah. Konsekuensi lain yang ditimbulkan sebagai akibat terbatasnya kapasitas dan kapabilitas sumberdaya ekonomi yang dimiliki daerah adalah ketidakleluasaan daerah yang bersangkutan untuk mengarahkan program dan kegiatan

pembangunan ekonominya, dan situasi ini menyebabkan munculnya pula disparitas pembangunan ekonomi wilayah. Kondisi ini tampaknya menjadi tak terhindarkan terutama bila dikaitkan dengan pelaksanaan otonomi daerah dewasa ini. Oleh karena itu peranan sumberdaya manusia dalam proses pembangunan ekonomi dalam konteks untuk mengurangi kesenjangan pembangunan ekonomi pada dasarnya harus dilihat dari aspek peningkatan kualitasnya. Dengan kualitas sumberdaya manusia yang semakin meningkat, akan dapat mendorong peningkatan produktivitas ekonomi sekaligus sebagai modal dasar untuk memacu pertumbuhan ekonomi.

Disamping itu ketersediaan informasi yang akurat mengenai potensi ekonomi di suatu daerah juga dapat menjadi jembatan untuk menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, hal ini dapat menarik perhatian calon investor untuk berinvestasi di suatu daerah sehingga roda ekonomi dapat berjalan dengan baik. Pemerintah daerah harus berperan aktif dalam memberikan informasi mengenai keadaan ekonomi daerah (baik sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia).

Perkembangan industri belum mengalami perubahan yang berarti walaupun diakui berbagai pihak lebih tahan terhadap guncangan resesi dibandingkan dengan usaha besar. Pelaku usaha industri kecil seringkali beranggapan bahwa faktor pendorong keberhasilan usahanya adalah dana dan pemasaran. Keberhasilan usaha sesungguhnya juga tergantung pada pengolahan pencatatan akuntansi sehingga memudahkan pengusaha untuk memperoleh informasi keuangan yang benar. Informasi yang baik akan mempengaruhi penyusunan estimasi dan prediksi perusahaan terhadap kondisi masa yang akan datang (Sugiri,1987:4)

Pencatatan akuntansi yang benar akan menghasilkan keuangan yang nantinya akan memudahkan industri kecil untuk mengakses bantuan permodalan. Sedangkan

pencatatan akuntansi yang kurang memadai akan mengakibatkan salahnya informasi keuangan yang dihasilkan sehingga keputusan yang diambil akan tidak tepat. Pada kenyataannya industri kecil khususnya di Kabupaten Lumajang masih belum menyadari arti pentingnya pencatatan akuntansi yang benar dan tidak membuat laporan keuangan setiap periodenya. Bagi mereka yang penting usahanya jalan terus yaitu dengan adanya permintaan dari konsumen tanpa membuat pencatatan akuntansi. Akuntansi wajib dilaksanakan pada perusahaan yang bertujuan untuk mencari laba maupun organisasi-organisasi yang tidak mencari laba. Salah satu penyebab adalah karena hal ini diharuskan oleh undang-undang.

Sebagian besar para pengusaha industri kecil bukan seorang akuntan, akan tetapi seharusnya mengetahui tentang proses akuntansi termasuk laporan keuangan. Bila dipikirkan beberapa industri kecil mungkin tidak membutuhkan laporan keuangan formal. Hal ini terjadi karena kecilnya usaha mereka sehingga cukup membuat laporan keuangan sederhana untuk mereka sendiri. Bagaimanapun besar atau kecilnya perusahaan membutuhkan laporan keuangan periodik. Karena pemilik perusahaan perlu mengetahui posisi keuangan dan hasil-hasil usaha yang telah dicapainya pada suatu saat tertentu.

Berdasarkan penelitian sebelumnya diketahui faktor pendidikan dan ketrampilan, kesadaran melaksanakan akuntansi, sarana dan fasilitas, ketentuan undang-undang mempengaruhi tidak terlaksananya akuntansi pada industri kecil, ini membuktikan bahwa kurangnya pengetahuan tentang akuntansi, kurangnya kesadaran dan fasilitas serta ketentuan undang-undang yang merepotkan menjadi penyebab industri kecil dan UMKM tidak bisa mengetahui kondisi perusahaan secara periodik, apakah mengalami peningkatan atau penurunan, sehingga ini terkesan jalan ditempat. Pengelolaan modal

usaha cenderung dilakukan dengan sistem perkiraan sehingga keluar masuk dana tidak bisa terkontrol dengan benar, sehingga ketika terjadi gejolak ekonomi perusahaan mengalami kebingungan untuk mengatur modal usahanya, ini pernah dialami oleh industri kecil kripik pisang di Kabupaten Lumajang pada tahun 2016, dimana industri ini sampai mengalami kemacetan modal ketika ada gejolak ekonomi naiknya harga BBM dan langkanya bahan baku utama pembuatan keripik yakni pisang. Berdasarkan paparan diatas peneliti ingin mengetahui penyebab tidak terlaksananya akuntansi pada industri kecil di Kabupaten Lumajang dengan judul penelitian **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TIDAK TERLAKSANANYA PRAKTIK AKUNTANSI PADA INDUSTRI KECIL DAN UMKM DI LUMAJANG”**

1.2



Batasan Masalah

Dikarenakan luasan masalah yang akan diteliti maka penelitian ini menggunakan regresi linear berganda.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah faktor pendidikan dan ketrampilan, kesadaran melaksanakan akuntansi, sarana dan fasilitas serta ketentuan undang – undang berpengaruh secara simultan terhadap tidak terlaksananya akuntansi pada industri kecil dan UMKM di Lumajang?
2. Apakah faktor pendidikan dan ketrampilan, kesadaran melaksanakan akuntansi, sarana dan fasilitas serta ketentuan undang – undang berpengaruh secara parsial terhadap tidak terlaksananya akuntansi pada industri kecil dan UMKM di Lumajang?
3. Faktor apakah yang dominan mempengaruhi tidak terlaksananya akuntansi dalam industri kecil dan UMKM di Lumajang?

3.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh simultan faktor pendidikan dan ketrampilan, kesadaran melaksanakan akuntansi, sarana dan fasilitas serta ketentuan undang – undang terhadap tidak terlaksananya akuntansi pada industri kecil dan UMKM di Lumajangp.
2. Untuk mengetahui pengaruh parsial pendidikan dan ketrampilan, kesadaran melaksanakan akuntansi, sarana dan fasilitas serta ketentuan undang – undang terhadap tidak terlaksananya akuntansi pada industri kecil dan UMKM di Lumajang.
3. Untuk mengetahui faktor yang dominan mempengaruhi tidak terlaksananya akuntansi dalam industri kecil dan UMKM di Lumajang.

3.5 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian penelitian ini antara lain :

1. Bagi pemilik industri kecil dan UMKM, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai masukan yang bermanfaat bagi perusahaan dalam usaha pengimplementasian sistem akuntansi, sehingga pihak perusahaan mengetahui pentingnya akuntansi untuk mengetahui kondisi usahanya.
2. Bagi peneliti, penelitian ini selanjutnya diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan, wawasan dan referensi bagi peneliti sendiri dan penelitian selanjutnya.
3. Bagi akademisi, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai salah satu referensi untuk kajian secara teoritis dan praktik.